

Perspektif Administrasi Negara Dalam Keberagaman SARA di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanpa disadari, perjalanan peradaban manusia di bumi ini menunjukkan pentingnya administrasi publik dan birokrasi dijalankan dalam berkontribusi untuk pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia di dunia. Perkembangan pesat administrasi publik ini terlihat jelas sekitar tahun 1950 dan mencapai pucuk sekitar tahun 1960 setelah Perang Dunia II dengan berbentuk *Comparative Administration Group* dibawah kepemimpinan Fred Riggs.

Sejak saat itu juga administrasi publik mulai masuk ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu administrasi publik mengalami pergeseran-pergeseran paradigma yang dimana masing-masing paradigma tersebut memiliki perbedaan. Dalam perjalanannya, administrasi publik tidak berjalan mulus, banyak tantangan yang menghambat berjalannya birokrasi khususnya di Indonesia. Akhir-akhir ini Indonesia di ramaikan dengan adanya Politik SARA. Politik SAR salah satu pemicunya adalah Isu-isu identitas: seperti agama, suku, atau ras. SARA merupakan akonim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita. Dalam konsep SARA terhang pengertian konflik horisontal yang dimotori oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antargolongan (TaufikAMullah, 1997).

Secara spesifik negara Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau yang tersebar dengan berbagai kemajemukannya. Berbagai macam etnis, suku, kepercayaan, budaya dan juga agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Keberagaman tersebut merupakan warisan sejarah yang di miliki Indonesia. Di Indonesia beberapa agama yang diyakini yaitu Agama Islam, Kristen protestan, Kristen katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Yang demikian disadari atau tidak disadari kondisi keberagaman ini menjadi pemicu terjadinya konflik di Indonesia.

Agama-agama tersebut tentunya mengajarkan kebenaran dan kebaikan serta memberi larangan merusak atau melakukan kekerasan dalam hidup manusia dalam kehidupan yang berdampingan dan selalu dalam kebersamaan yang damai. Akan tetapi masih banyak manusia yang tidak memahami kebenaran agama tersebut, sehingga

konflik terus bermunculan di Masyarakat dan dapat mengakibatkan bencana yang dapat mengancam sistem administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman dalam realitas kehidupan Sistem Administrasi Negara Indonesia sebagai kajian multidimensional dan persamaan hak sebagai warga negara yang memiliki tugas untuk selalu menyebarkan perdamaian

Dengan beragamnya suku, agama, ras, dan antargolongan di Indonesia tentu akan memicu terjadinya konflik. Namun bangsa Indonesia dan pemimpin negara kita selalu berusaha meredakan konflik yang ada dengan menanamkan ideologi Pancasila. Masyarakat Indonesia yang multikultural hanya perlu memupuk dan memelihara hal itu sehingga dapat memperkaya budaya yang dimiliki bangsa dan juga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Persatuan dan persatuan bangsa Indonesia semakin tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Dahulu kala kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia mempunyai arti yang berbeda-beda sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa untuk meraih keberkahan dari kesatuan dan orisinalitas inilah bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah, membangun kemauan bangsa, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kemerdekaan dengan upaya pembangunan negara. Meskipun masyarakat Indonesia namun terdapat keberagaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat masih menjadi keluarga besar Indonesia dibawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu prinsip yang mendasari perspektif administrasi negara terhadap keberagaman di negara kita adalah asas Bhineka Tunggal Ika, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Ini adalah konsep yang mendorong persatuan dalam keberagaman, dimana semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan.

Adanya kenyataan bahwa Indonesia mempunyai berbagai keragaman di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multikulturalisme sebagai salah satu model pendidikan di masa mendatang. Menurut el-Mahady (2004) dikatakan bahwa: ”Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural.” Ia juga mengatakan bahwa multikulturalitas tersebut mendorong kebutuhan mendesak untuk

mengkonstruksikan kembali budaya bangsa yang dapat menjadi “*integrating force*” yang bisa mengikat seluruh keragaman etnis, suku bangsa dan budaya tersebut.

Kondisi realitas masyarakat Indonesia sekarang ini masih ada anggapan dari sebagian kelompok masyarakat bahwa perbedaan itu adalah musuh yang harus dikalahkan, perbedaan itu adalah suatu ancaman yang harus dihilangkan. Kelihatannya terlalu berlebihan, keberagaman suku, agama, budaya, ras dan antar golongan bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa. Tetapi justru perbedaan itu adalah jalan menuju pengintegrasian bagi bangsa Indonesia. Artinya, kondisi masyarakat yang sangat multikultural itu bisa mendorong masyarakat untuk secara otomatis melakukan pengintegrasian secara menyeluruh.

Administrasi negara Indonesia harus menerapkan kebijakan multikulturalisme yang menghargai dan mendukung keberagaman, termasuk juga perlindungan terhadap kaum minoritas, promosi toleransi, serta memperlakukan semua warga negara dengan setara dan sama rata. Administrasi negara juga harus proaktif terhadap penyelesaian masalah terkait SARA dengan cara adil dan damai.

Atas keberagaman ini, administrasi negara juga memiliki perspektif yang penting karena negara Indonesia secara konstitusional diakui sebagai negara Pancasila, dimana Pancasila menganut prinsip-prinsip inklusivitas dan juga keragaman. Bukan hanya sekedar prinsip dan nilai tetapi juga sebagai landasan ideologis yang mengakomodasikan keberagaman dan memberikan kerangka kerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Di Indonesia sendiri, awal mula terjadinya SARA memiliki sejarah yang Panjang, yang melibatkan banyak faktor. Sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, agama, dan etnis yang kaya, Indonesia memiliki sejarah konflik yang beragam pula. *Masa pertama* yaitu era pra-kemerdekaan terjadi konflik suku yang melibatkan beberapa kerajaan dan sultanat yang menguasai berbagai wilayah, sehingga menimbulkan konflik antar suku yang saling bersaing untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Selain konflik suku, terdapat juga konflik agama di era ini, selama masa penjajahan, banyak agama-agama yang masuk ke Indonesia seperti islam, Kristen dan hindu yang dibawa para penjajah yang terkadang memicu ketegangan antara agama. *Masa kedua* yaitu pada masa kemerdekaan terjadi konflik nasionalis dengan kaum kolonial yang menyebabkan konflik bersenjata. konflik ideologi juga terjadi di masa ini,

terdapat banyak perbedaan ideologi di kalangan pejuang kemerdekaan, seperti perbedaan antara nasionalis, islamis, dan komunis. Hal ini yang memicu konflik ideologi terjadi. *Masa ketiga* yaitu di era kemerdekaan terjadi konflik etnis yang terjadi dan terkadang muncul karena perbedaan budaya, Bahasa dan sejarah. Konflik agama juga terjadi di masa ini. *Masa keempat* yaitu pada masa orde baru, pada masa ini banyak penindasan terhadap kelompok kaum minoritas. *Masa kelima* yaitu masa reformasi dan pasca orde baru, di masa ini konflik politik mulai terjadi yaitu setelah jatuhnya rezim Suharto, muncul konflik politik antar golongan yang berbeda yang berupaya mempengaruhi arah politik Indonesia. *Masa keenam* yaitu pada zaman kontemporer terjadi konflik Papua, konflik yang berlarut-larut di provinsi tersebut antara kaum separatis dan pemerintah Indonesia. Konflik radikalisme juga terjadi di masa ini, dimana ancaman teroris dan radikalisme agama terus ada, meskipun ada perlawanan keras dari pemerintah.

Konflik-konflik yang terjadi sering disebabkan karena persaingan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan yang paling utama adalah perbedaan ideologi. Akan tetapi walaupun banyak konflik yang terjadi di Indonesia, Indonesia juga memiliki banyak toleransi dan juga kerukunan antar etnis, agama, dan budaya. pada sudut lain (berdasarkan temuan-temuan historis) SARA justru sebagai arena pemberdayaan dan demokrasi. Indonesia penduduknya saat ini kurang lebih 200 juta orang dan terdiri dari multi etnis (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian) di mana masing-masing masih dibagi lagi ke dalam sub-sub etnis seperti Sunda, Padang, Jawa, Amungme, dll. Elemen-elemen dalam SARA tidak selalu terpisah secara kaku tetapi ada kemungkinan terjadi apa yang oleh seorang sosiolog yang bernama Peter Blau (1964) dinamakan *cross cutting affiliation*. Misalnya, ada orang-orang yang berbeda ditinjau dari etnis tetapi disatukan dalam agama, ekonomi, dan kepentingan yang sama. Dari sisi etnis Batak dan Cina berbeda tetapi kadang disatukan karena mereka pemeluk agama Protestan dan sama-sama berdagang. Selain itu masih banyak lagi kelompok-kelompok kepentingan yang berkembang dalam masyarakat dari sekedar untuk reuni hingga kelompok strategis yang memiliki interest mempertahankan status quo (kondisi yang sedang berjalan saat ini). Semua elemen itu dapat berpeluang sebagai konflik sekaligus kekuatan integratif.

Politisasi SARA pernah menjadi ancaman bagi pemilu. Dalam sebuah penelitian oleh Y. S. Dewi dan R. Hartono (2019), mereka menemukan bahwa politisasi SARA

dapat terjadi karena adanya kepentingan politik dari elit politik yang ingin mempertahankan kekuasaan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Politik identitas dalam pemilihan umum, seperti politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) telah menjadi topik yang cukup populer di kalangan akademisi dan praktisi politik di Indonesia. Menurut Azizah (2019), politisasi SARA merupakan salah satu bentuk politik identitas yang digunakan oleh elit politik untuk memenangkan pemilihan umum dengan memanfaatkan perbedaan-perbedaan identitas sosial yang ada di masyarakat. Untuk mencegah hal itu, penelitian menyarankan beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti pengawasan dari Lembaga pemilu, dan melakukan sosialisasi yang intensif tentang bahaya politisasi SARA. Dalam sebuah penelitian oleh M. Adi dan D. Wahyudi (2020), mereka menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menghindari politisasi SARA dalam pemilu cenderung lebih mampu memilih dengan bijak dan rasional. Secara keseluruhan, pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu merupakan isu penting yang memerlukan perhatian dan upaya yang serius dari semua pihak terkait. Upaya pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melakukan sosialisasi yang intensif dan edukasi tentang bahaya dari kedua praktik tersebut.

Dengan memahami realitas sejarah sebagaimana dikemukakan di atas, ideologi dan sikap dalam memahami SARA harus diubah, terutama terkait ideologi SARA. sebagai sumber perpecahan menjadi SARA sebagai kekuatan yang memberdayakan dan sosial demokrasi. tetapi inversi penpektive saja tidak cukup. Dibutuhkan politik dan infrastruktur yang memadai dan mendukung proses ini. Salah satu solusinya adalah dengan menempatkan peran negara sebagai fasilitator, pemberi energi dan menstabilkan kekuatan-kekuatan yang ada pada komponen SARA. tentu, dalam setiap komponen SARA masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Pada tahap inilah negara berupaya menjembatani kesenjangan tersebut atau menanggapi kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut. Tetapi tuntutan itu hanya dapat dicapai jika negara benar-benar terlibat dengan rakyat agar setiap kebijakan yang dibuat selalu bisa mewakili rakyat. Dengan kata lain peran tersebut hanya mungkin terjadi di negara dengan sistem politik demokratis seperti Indonesia. Di negara yang monolitik, realitas SARA tentu saja cenderung terabaikan. hanya untuk integritas rezim, melalui

kekuasaan dominan atau bahkan faktor agama di seleksi bersama dan depolitisasi. Contohnya agama tidak dapat digunakan untuk tujuan politik, namun pada nyatanya tidak jarang digunakan oleh otoritas agama sebagai alat untuk memobilisasi rakyat demi kepentingan rezim. Sementara itu, politisasi SARA dapat dihindari dengan memperkuat nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan persatuan dalam masyarakat. Partai politik dan calon yang berkompetisi dalam pemilu harus menekankan pada platform dan program kerja, serta menghindari isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat berdasarkan agama, suku, dan ras. KPU juga dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi politisasi SARA dengan mengeluarkan aturan dan pedoman yang jelas dan tegas. Dalam upaya mencegah politisasi SARA dalam pemilu serentak, diperlukan partisipasi dan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan menjaga integritas dan keadilan pemilu, proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh rakyat.

Perspektif yang memahami SARA sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat mempunyai sifat teori retrograde teoritis dalam pemikiran Peter Berger dan Richard Neuhaus (1977) tentang “struktur mediasi” atau peran lembaga mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi. Mereka sepakat bahwa lembaga mediasi dapat mencakup kelompok lingkungan, agama, etnis, keluarga, atau ras, dan kelompok swadaya (termasuk kelompok kepentingan) dapat digunakan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi realitas makro atau kebijakan publik. Individu akan merasa tidak berdaya untuk mengungkapkan aspirasi jika menampilkan dirinya sebagai individu di hadapan negara dan kebijakan objektifnya. Mereka akan merasa lebih berdaya jika mereka menyalurkan kepentingannya melalui lembaga mediasi karena dalam lembaga tersebut individualitas diakui atau masih diakui dan masih ada pengakuan atas identitas pribadi, sementara realitas publik sangat impersonal. Berawal dari pola pikir seperti itu, unsur SARA juga merupakan perantara yang dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan dalam kerangka demokratisasi politik.

Terbukti jelas bahwa Lembaga mediasi bermanfaat untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam konteks kemajemukan dan demokrasi. Banyak orang pribumi pada masa penjajahan Hindia Belanda yang menggunakan Lembaga mediasi dalam bentuk SARA, misal etnis, sebagai sarana penyaluran aspirasi politik. Secara individual mereka tidak mampu menghadapi kebijakan pemerintah kolonial maka mereka

mempergunakan etnis sebagai alat perjuangan. Sebagai contoh pada masa kolonial pemuda-pemuda Nusantara berluang le*at media etnis dengan membentuk Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, dll. Mediasi agama juga digunakan oleh pedagang-pedagang Islam yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah kolonial dengan memberi konsesi pada pedagang Cina maka mereka mendirikan Serikat dagang Islam.

Peran Administrasi negara dalam hal ini kaitannya dengan keragaman SARA di Indonesia. Pemerintah harus melakukan tatanan pemerintahan yang baik dimana hal itu menjadi landasan pembangunan dan kebijakan di negara yang multikultural ini. Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat diminimalkan, dipecahkan dan juga dipulihkannya segala bidang dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Disadari, dalam mewujudkan tata pemerintahan membutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya yang didukung dari segala pihak dan dilakukan secara terus. Selain itu aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat harus bersatu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Erat kaitannya dengan prinsip yang sudah ada sebelumnya yaitu *Good Governance*. Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “Governance” adalah “kepemerintahan”. Robert Charlick dalam Pandji Santosa (2008:130) juga mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Sedangkan menurut UNDP (United National Development Planning), Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu kesejahteraan rakyat (economic governance), proses pengambilan keputusan (political governance), tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance) (Prasetijo, 2009). Dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang memegang solidaritas dan tanggung jawab yang kuat, juga efisien dan efektif dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya alam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Perwujudan kemajemukan masyarakat Indonesia tidak hanya terletak pada cita-cita semata, namun juga pada kenyataan sosial politik keseharian yang diimpikan setiap warga negara, yang memerlukan berbagai bentuk tuntutan. Tuntutan tersebut berupa pengakuan substansial dan resmi, baik dari sisi kekuasaan maupun dari sisi masyarakat, serta kelompok sosial, politik, dan budaya, bahwa konsep dan realitas SARA mewakili energi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat majemuk dan demokratis. Oleh karena itu, syarat-syarat tertentu yang mutlak harus dipenuhi agar pluralisme ingin tercapai. Pertama, perlu diperoleh opini politik dari para penguasa yang serius dan tulus dalam membangun struktur metapolitik dan apolitis yang mengakui keberadaan pluralisme. Kedua, masyarakat dan kelompok serta golongan mana pun mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam debat atau diskusi publik mengenai SARA tanpa harus memaksakan rasa identitas negara pada masyarakat sipil. ketiga Semua pihak harus memahami bahwa SARA selain berpeluang menimbulkan konflik (yang cenderung terjadi dalam lingkungan politik yang monolitik), juga dapat menjadi energi untuk mencapai pemberdayaan atau demokrasi (yang cenderung terjadi dalam iklim politik liberal).

SARA dipahami sebagai energi yang mengandung kekuatan konflik tanpa mempertimbangkan SARA sebagai potensi demokrasi. Visi pluralisme dalam arti substantif terdapat pada ungkapan latin yaitu “E Pluribus Unum.” Ungkapan ini mengandung arti pengakuan terhadap pluralisme atau masyarakat cenderung mencegah tindakan politik otoriter. Yang dilakukan oleh satu kelompok berupa rezim politik, kelompok kepentingan, suku, agama, dan lain-lain. Visi seperti ini, jika diterapkan dalam konteks politik tertentu, akan membuat masyarakat dan mekanisme zero-sum game karena kemenangan bukan hanya milik satu kelompok tetapi milik semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi politik.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan good governance diperlukan sebuah etika untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik, segala bentuk konflik termasuk konflik SARA dapat menyebabkan uruknya pelayanan publik. Etika dalam administrasi publik dipandang sebagai standar/norma yang menentukan kualitas tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Etika menurut Bertens (1977) “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkahlakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh

suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Administrasi Publik bertindak dalam menghadapi keragaman SARA di Indonesia?
2. Siapa yang paling berperan dalam mewujudkan Indonesia yang berintegritas dalam negara demokrasi ini? masyarakat atau pemerintah?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor politisasi SARA di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran administrasi negara dalam menghadapi keragaman SARA di Indonesia
2. Untuk mengetahui awal kemunculan politisasi SARA di Indonesia
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan Lembaga pemerinta dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh keberagaman SARA di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Dra. Triyuningsih, M. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*. Doktor Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.
- Engkus. (2017). ARTIKEL91ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKOLOG. *Vol 7, No 1 (2017)* .
- Jamaluddin, J. A. (n.d.). *Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi SARA Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023*. Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
- Masagung, H. (n.d.). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Nugroho, H. (1999). Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. volume I Nomor 2, Nopember 199*.
- Shofa, A. M. (2016). MEMAKNAI KEMBALI MULTIKULTURALISME INDONESIA DALAM . *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016*.